

BAB IV

PENUTUP

IV.I Kesimpulan

Reformasi ekonomi China pada tahun 1979 menjadi awal terbukanya perekonomian China. Strategi ini dilakukan dibawah kerangka sebagai negara sosialis dimana sentralitas negara tetap diutamakan. Sistem perekonomian China yang terpusat secara bertahap mengalami perubahan. Reformasi ekonomi yang dijalankan oleh China diatur sedemikian rupa untuk berjalan secara gradual dan konsisten. Hal ini guna menghindari kerusakan pada sistem ekonomi domestik dan memberikan waktu penyesuaian bagi institusi ekonominya.

Reformasi sistem nilai tukar China dilakukan dalam kerangka besar reformasi ekonomi China yang gradual dan konsisten. Reformasi sistem nilai tukar ini diarahkan menjadi lebih fleksibel dan *market-based*. Evolusi sistem nilai tukar China terjadi sebagai berikut :

- Era pra-1979 : Sistem nilai tukar *fixed*
- Era Post 1979 :
 - Tahun 1979 – 1993 : Sistem nilai tukar *dual-track*
 - Tahun 1994 – 2005 : Sistem nilai tukar *peg*
- Post 2005 : Sistem nilai tukar *managed float*

Sistem nilai tukar *peg* telah dipakai China sejak tahun 1994-2005 memberikan stabilitas bagi perekonomian China. Namun, di sisi yang lain, hal ini dianggap menjadi salah satu sumber defisit perdagangan di negara partner dagang China. AS sebagai salah satu partner dagang terus mengalami peningkatan defisit. Hal ini mendorong AS untuk memberikan tekanan kepada China guna melakukan apresiasi terhadap nilai tukar dan mempercepat proses reformasi sistem nilai tukarnya. Berbagai legislasi dikeluarkan oleh Senat dan Kongres AS. Legislasi ini pada umumnya diarahkan untuk memberikan ancaman akan diberlakukannya tarif tambahan terhadap produk China yang masuk ke AS. Namun, melihat besarnya hubungan dagang AS-China dan juga karena China tidak terbukti melakukan manipulasi mata uang, maka tekanan tersebut semakin bersifat

diplomatis dan advokasi. Diplomasi ini dilakukan oleh Presiden, pejabat *Treasury* AS, anggota Kongres, dan lainnya. Langkah yang paling nyata yang dilakukan oleh AS adalah dengan advokasi yaitu menunjuk *special envoy* untuk kasus ini di China. Harapan AS agar China merevaluasi nilai RMB, yang dianggap *undervalued* sekitar 40% dan mempercepat transformasi sistem nilai tukar menjadi *market-based* ditolak oleh China.

Penelitian ini memberikan alasan-alasan penolakan China tersebut dalam kerangka berpikir realis dan Mundell-Flemming Model. Preposisi utama realis yang dipakai dalam penelitian ini adalah sentralitas negara sebagai aktor yang berdaulat dan rasional dalam sistem yang bersifat *self-help*. *Self-help system* ini sendiri menjadi latar belakang dalam melihat sistem moneter internasional dimana negara tidak dapat bergantung pada sistem ketika mengalami defisit. Hal ini dibuktikan karena beban *adjustment* selalu dibebankan kepada negara yang deficit, bukan negara yang surplus (dengan asumsi neraca tersebut akan mengalami *self-correction*). Sentralitas negara sebagai negara berdaulat ditunjukkan melalui sikap pemerintah untuk mengambil posisi sentral dalam menghadapi berbagai isu di domestik, sedangkan rasionalitas negara ditunjukkan melalui perhitungan *cost-benefit*. Perhitungan *cost-benefit* pada isu ini akan dibantu oleh model Mundell-Flemming. Model ini menunjukkan bagaimana negara harus memilih dua dari tiga situasi makroekonomi yang diinginkan. Kerangka ini menjadi operasionalisasi faktor ekonomi dan politik.

Dalam kasus China, pemerintah memilih untuk mencapai stabilitas nilai tukar dan otonomi moneter dengan mengorbankan integrasi sistem financial secara utuh melalui mobilitas modal. Stabilitas nilai tukar memiliki nilai vital bagi pertumbuhan ekonomi China. Hal ini dikarenakan China bergantung pada industri yang berorientasi ekspor. Karenanya, nilai tukar China yang stabil sangat penting dalam mempertahankan *demand* atas produk China. Mobilitas modal di China diatur ketat pemerintah, hal ini bertujuan untuk mencapai distribusi sumber ekonomi yang merata demi menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. Hal ini tidak membuat investasi asing di China mengalami penurunan. FDI di China terus mengalami peningkatan dan berpusat pada industri-industri China yang produktif. Disini terlihat bahwa pemerintah China mencoba menyeimbangkan distribusi

modal. FDI dengan sendirinya, tanpa intervensi pemerintah, akan mengarah pada industri atau wilayah yang produktif, seperti daerah-daerah pusat industri China. Maka dari itu, pemerintah dibutuhkan untuk mengarahkan modal yang ada di negara ke daerah-daerah yang kurang produktif. Peran negara, dalam hal ini Bank Sentral dan institusi finansial lainnya, menjadi sangat vital. Karenanya, otonomi moneter menjadi salah satu pilihan yang dipertahankan oleh pemerintah China.

Dimensi politik dalam isu nilai tukar China ada pada level domestik dan internasional. Pada level domestik, China membutuhkan situasi makro-ekonomi untuk mempertahankan otoritas politik PKC. Hal ini dilakukan dengan menjamin kesejahteraan penduduk. Kesejahteraan disini adalah dimulai dengan penyediaan lapangan pekerjaan atau kebijakan “iron rice bowl”. Sentralisasi ketersediaan lapangan pekerjaan di China semakin mengarah ke sektor industri, karenanya pemerintah harus mempertahankan stabilitas sector ini. Pada level internasional, tekanan AS yang diberikan AS diterjemahkan sebagai intervensi. Hal ini tidak akomodatif bagi reformasi itu sendiri karena beberapa alasan. Pertama, pemerintah China tidak ingin reformasi sistem nilai tukar ini dinilai sebagai bentuk pemenuhan tekanan negara lain. Hal ini ditegaskan oleh pemerintah China melalui setiap kesempatan yang ada, baik itu oleh Presiden, Wakil Presiden, atau *officials* PBC. Reformasi sistem nilai tukar China harus dilakukan atas insentif domestik. Kedua, tekanan ini menimbulkan spekulasi pada sistem finansial China yang dapat menimbulkan instabilitas dalam sistem ekonomi China. Salah satu hal yang dikhawatirkan adalah penarikan modal oleh para investor. Selain politik domestik, China juga mempertimbangkan faktor politik regional Asia dimana kestabilan mata uang China sangat dibutuhkan didalamnya.

Selain faktor ekonomi-politik di atas, mempelajari reformasi ekonomi China dari tahun 1979 sampai sekarang, menegaskan kembali bahwa proses reformasi ini memang harus dilakukan secara bertahap. Terlepas dari faktor ekonomi-politik tersebut, kesiapan institusi dalam menerima perubahan juga menjadi salah satu alasannya. Inefisiensi pada institusi ekonomi China yang sebelumnya sangat terpusat, tidak *compatible* terhadap sistem yang berdasarkan pasar. Karenanya, reformasi sistem nilai tukar diarahkan secara perlahan seiring dengan reformasi institusi ekonomi domestik China.

Dapat disimpulkan bahwa, penolakan China terhadap tekanan AS dalam reformasi sistem nilai tukar China didasari pada faktor-faktor ekonomi politik. Secara ekonomi, China memilih untuk tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar demi kepentingan perdagangan internasional dan investasi asing. Sesuai dengan model Mundell-Flemming, bahwa pilihan China untuk mempertahankan stabilitas nilai tukarnya disertai oleh pilihan antara mobilitas modal dan otonomi moneter. Karena otonomi moneter China sangat diperlukan dalam menjaga kestabilan nilai tukar secara khusus, dan stabilitas ekonomi secara lebih luas, maka mobilitas modal dikorbankan. Namun, hal ini tidak berarti menghalangi sistem finansial China untuk menjadi efisien. Intervensi pemerintah ternyata menghasilkan situasi ekonomi yang baik bagi China sendiri. Situasi yang favorable bagi China ini sangat penting bagi pemerintah China dalam mempertahankan legitimasi politiknya, karena sebagai negara sosialis, pemerintah China berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Penolakan ini juga dilandasi oleh alasan politik dimana China tidak ingin kedaulatannya dalam menjalankan reformasi diintervensi oleh negara lain. Kalaupun ada perubahan yang dilakukan oleh China, hal itu bukan karena demi mengakomodir tekanan internasional tetapi atas inisiatif pemerintah China sendiri. Selain itu, faktor politik domestik AS juga mempengaruhi munculnya tekanan terhadap China. Faktor sejarah juga mempengaruhi penolakan ini. Sejarah membuktikan bahwa reformasi ekonomi China dilakukan secara gradual dan lambat, dalam artian sangat memperhitungkan kesiapan sistem dan institusi domestik dalam menerima perubahan.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa model Mundell-Flemming saja tidak dapat menjelaskan secara sempurna mengenai alasan-alasan penolakan China. Terdapat faktor politik dan sejarah yang ternyata juga memiliki peran penting di dalamnya. Disinilah ilmu HI, dalam hal ini adalah perspektif realis, memainkan peran dalam menutupi kekurangan kerangka pemikiran ekonomi. Hal ini mengkonfirmasi lagi pentingnya membahas satu isu dari perspektif ekonomi-politik (internasional). Seperti yang dinyatakan oleh Robert Gilpin (2001), perspektif ekonomi hanya akan membicarakan bagaimana pencapaian kemakmuran secara efisiensi, tetapi ekonomi-politik membantu untuk sampai pada bagaimana kemakmuran itu sendiri dibagikan. Hal inilah yang sangat

disadari oleh pemerintah China dalam melakukan reformasi sistem nilai tukar secara khusus dan reformasi ekonomi secara umum.

Pembahasan dan penelitian isu moneter internasional selama ini didominasi oleh ilmu ekonomi. Penelitian ini telah memberikan alternatif dalam memandang isu moneter melalui perspektif HI. Penelitian ini menunjukkan bagaimana ekonomi-politik internasional dan perspektif realis dapat membantu menciptakan kerangka pemikiran yang lebih komprehensif.

IV.2. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

8. Rekomendasi Kebijakan
 9. Pemerintah hendaknya memilih sistem nilai tukar sesuai dengan tujuan ekonomi domestiknya, tanpa pengaruh tekanan dari negara lain. China membuktikan bahwa sistem yang berbeda dengan standard internasional pun dapat menjadi efisien dan mengakomodir tujuan domestik. Hal ini ditunjukkan oleh China melalui sistem finansialnya yang membatasi mobilitas modal internasional, namun dapat bekerja dengan efisien.
 10. Pemerintah juga hendaknya memperhatikan kondisi domestik dan juga internasional dalam menghasilkan suatu kebijakan. Di dalam sistem moneter internasional, kebijakan satu negara akan mempengaruhi negara lain juga. Semakin terintegrasi dengan sistem moneter internasional, maka semakin besar keterkaitan yang ditimbulkan.
 11. Pemerintah hendaknya tidak bergantung pada sistem ataupun negara lain dalam menghadapi permasalahan domestiknya (*self-help system*). Terutama dalam sistem moneter internasional yang di dalamnya *adjustment* akan dibebankan pada negara defisit.
12. Rekomendasi Penelitian selanjutnya
 13. Melakukan penelitian mengenai sistem moneter regional atau *regional financial architecture* di Asia dan hubungannya dengan

penolakan China. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konteks yang lebih luas dalam isu sistem nilai tukar.

14. Melakukan penelitian mengenai interaksi negara (China dan Amerika Serikat) dalam kerangka sistem moneter internasional. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem moneter internasional beroperasi dan mengoreksi permasalahan-permasalahan yang muncul. Penelitian ini nantinya akan membantu dalam pencarian bentuk ataupun perbaikan sistem moneter internasional.

